

SKRIPSI
PERAN ELIT PARTAI PENGUSUNG PRABOWO-SANDI PADA
PILPRES 2019 DI KOTA MAKASSAR



Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana
Ilmu Politik Pada Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik

Oleh :
Dianto Pasae

E 111 15 311

DEPARTEMEN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR

2020

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI
PERAN ELIT PARTAI PENGUSUNG PRABOWO-SANDI PADA PILPRES
2019 DI KOTA MAKASSAR

Di susun dan diajukan oleh:

Dianto Pasae

E 111 15 311

Akan dipertahankan dan dihadapan pada tim penguji skripsi

Pada tanggal : **25 Agustus 2020**

Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Ariana, S.IP.M.Si
NIP. 197107051998032002

Pembimbing II



Ummi Suci Fathia B. S.IP M.IP
NIP. 199205022019044001

Mengetahui :

Ketua Departemen Ilmu Politik




Drs. H. A. Yakub, M.Si. Ph.D
NIP. 196212311990031023

LEMBAR PENERIMAAN
SKRIPSI
PERAN ELIT PARTAI PENGUSUNG PRABOWO-SANDI PADA
PILPRES 2019 DI KOTA MAKASSAR

Di susun dan diajukan oleh :

DIANTO PASAE
E 111 15 311

dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian skripsi
pada Program Studi Ilmu Politik
Departemen Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Menyetujui,

PANITIA UJIAN

Ketua	: Dr. Ariana, S.IP,M.Si	(.....)
Sekretaris	: Ummi Suci Fathia B. S.IP, M.IP.	(.....)
Anggota	: Dr. Phil. Sukri, S.IP,M.Si	(.....)
Anggota	: Haryanto, S.IP, MA	(.....)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DIANTO PASAE

NIM : E11115311

Jenjang Pendidikan : Strata-1 (S1)

Program Studi : Ilmu Politik

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Peran Elit Partai Pengusung Prabowo-Sandi pada Pilpres 2019 di Kota Makassar”** adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat di buktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi skripsi ini hasil karya orang lain atau melakukan kutipan tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 25 agustus 2020



(DIANTO PASAE)

ABSTRAK

DIANTO PASAE. NIM E11115311. Peran Elit Partai Pengusung Prabowo Sandi pada Pilpres 2019 di Kota Makassar. Di bawah bimbingan Dr. Ariana, S.IP,M.Si dan Ummi Suci Fathia B. S.IP, M.Si.

Pemilihan presiden dan wakil presiden yang di laksanakan pada 17 April 2019 di kota Makassar di menangkan oleh pasangan Prabowo Sandi. Hal ini tidak terlepas dari peran elit politik. Elit adalah individu atau kelompok yang memiliki kemampuan lebih dan mendominasi dalam lingkungan masyarakat. Elit ini mampu mengontrol dan mengarahkan masyarakat dalam bidang tertentu sesuai dengan bidangnya. Penelitian ini berfokus pada bagaimana peran elit partai Gerindra pada kemenangan Prabowo Sandi di Kota Makassar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan keterlibatan elit partai gerindra pada pemilihan presiden dan wakil presiden serta menggambarkan apakah elit partai Gerindra berpengaruh pada perolehan suara Prabowo Sandi di Kota Makassar. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis. Data dari penelitian ini di peroleh dari hasil wawancara dan literature-literature serta artikel yang berhubungan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pengaruh dan keterlibataan elit partai Gerindra dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 di kota Makassar yang pertama adalah dari kemampuan elit partai Gerindra mengangkat personal brand pasangan calon Prabowo Sandi sehingga tertanam di dalam masyarakat. Kedua, sosialisasi elit partai Gerindra secara masif di lingkungan internal partai maupun di lingkungan masyarakat. Ketiga, Elit Gerindra mengkonsolidasi setiap kekuatan kelompok/komunitas relawan yang mendukung pasangan calon Prabowo Sandi di Kota Makassar sehingga menghasilkan kelompok yang besar yang mampu membantu dalam proses memenangkan calon yang di usung.

Kata kunci : Peran, Elit Partai, Partai Gerindra, Pilpres 2019

ABSTRACT

Dianto Pasae. NIM E11115311. The Elite role of Prabowo Sandi's supporting party in the 2019 presidential Election in Makassar City. Under Dr. Ariana,S.Ip,M.Si and Ummi Suci Fathia B. S.IP, M.Si.

The presidential and vice presidential elections which were held on April 17, 2019 in Makassar City were won by the Prabowo Sandi pair. This is inseparable from the role of the political elite. Elites are individuals or groups who have more ability and dominate in society. This elite is able to control and direct society in certain fields according to their fields. This research focuses on how the elite role of the Gerindra party in Prabowo Sandi's victory in the city of Makassar. The purpose of this study to describe the involvement on the elite Gerindra party in the presidential and vice presidential elections and to describe whether the elite Gerindra party influences the Prabowo Sandi vote acquisition in the City of Makassar. This research is a descriptive analysis research. The data from this study were obtained from interviews and literature and articles related to this study.

The results of this study explain that the influence and involvement of the Elite Gerindra party in the 2019 presidential and vice presidential elections in the City of Makassar is the ability of the Gerindra party elite to compare the Prabowo Sandi candidate pair so that the personal brand is embedded in society. Second, massive socialization of Gerindra party elites within the party's internal circles and in the community. Third, the Gerindra elite consolidates every strength of volunteer groups/communities that support the candidate pair Prabowo Sandi in Makassar City so as to produce a large group that is able to assist in the process of winning the candidate being carried.

Keywords : Role, Party Elite, Gerindra Party, 2019 presidential elections

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas segala kasih karunia, berkat dan penyertaan-Nya yang tiada terhingga, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi dengan judul **“Peran Elit Partai Pengusung Prabowo-Sandi Pada Pilpres 2019 Di Kota Makassar”**.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kesalahan dikarenakan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan banyak kritik dan saran demi penyempurnaan tulisan ini yang kiranya kelak dapat bermanfaat dan digunakan dengan sebaik-baiknya. Begitu banyak rintangan, gangguan, dan ujian yang penulis hadapi selama menyusun skripsi ini hingga pada tahap ujian akhir. Namun berkat adanya bantuan dukungan, dorongan, do'a, serta semangat dari berbagai pihak yang mengiringi perjalanan penulis. Dan melalui kata pengantar ini, izinkan penulis untuk mengucapkan terimakasih dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya untuk semua pihak tanpa terkecuali atas segala bantuannya.

Tak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas keberhasilan penulis dalam penyusunan skripsi ini kepada :

1. Ibu **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA** selaku Rektor Universitas Hasanuddin.

2. Bapak **Prof. Dr. Armin, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
3. Bapak **Drs. H. A. Yakub, M.Si, P.hD** selaku Ketua Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
4. Ibu **Ariana, S.IP, M.Si** selaku pembimbing I dan Ibu **Ummi Suci Fathia B. S.IP, M.IP** selaku Pembimbing II yang senantiasa membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat selesai.
5. Seluruh dosen pengajar **Prof. Muhammd, M.Si, M.Si; Dr Muhammad Saad, MA; H. A. Yakub, M.Si, Ph.D; A. Naharuddin, S.IP, M.Si; Dr. Phil. Sukri, M.Si; Dr. Ariana Yunus, S.IP, M.Si; Dr. Gustiana A. Kambo S.IP, M.Si, S.IP, M.Si; Endang Sari, S.IP, M.Si; Ummi Suci Fathiah B, S.IP, M.IP; Hariyanto, S.IP, M.A; Prof. Basir Syam, M.Ag; Dr. Imran M.Si dan Sakinah Nadir S.IP, M.Si**, terima kasih atas pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis selama ini serta atas kuliah-kuliah inspiratifnya.
6. Seluruh staf pegawai Departemen Ilmu Politik, yang senantiasa memberikan arahan dalam pengurusan berkas.

7. Kepada kedua orang tua penulis yang senantiasa memberikan doa, mencurahkan seluruh kasih sayang dan menjadi penyemangat bagi penulis.
8. Kepada Risna Palitak SE yang telah membantu dan memberi suport dalam penyusunan skripsi.
9. Keluarga Besar Himapol FISIP Unhas yang tidak bisa saya sebutkan namanya, terima kasih atas dukungan kepada penulis.
10. Kepada teman-teman, rekan-rekan **KKN Desa Mattirotasi di Kabupaten Maros gelombang 99**. Terima kasih atas kerja sama, kebersamaan, waktu, dan kenangan selama KKN.
11. Terima kasih juga tidak lupa penulis ucapkan kepada para informan atas segala waktu yang diluangkan serta atas keterbukaan kepada penulis, sehingga penulis memperoleh informasi yang penulis butuhkan.

Selebihnya terima kasih dan mohon maaf kepada seluruh teman-teman yang terlupa dan tak bisa penulis tuliskan satu-persatu, sesungguhnya kalian tetap teringat sebagai catatan akhir kuliah di kehidupan kemahasiswaan penulis. Akhirnya penulis menyadari atas segala keterbatasan, untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Sekian dan terima kasih.

Makassar, 25 Agustus 2020

DIANTO PASAE

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Teori Elite Politik	8
2.2 Konsep Elite Partai	19

2.3 Konsep Strategi	23
2.4 Penelitian Terdahulu	25
2.5 Kerangka Pikir	29
2.6 Skema kerangka pikir	31

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian	32
3.2 Tipe dan Dasar Penelitian	32
3.3 Sumber Data	32
3.4 Teknik Pengumpulan Data	33
3.5 Teknik Analisis Data	34

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kota Makassar	37
4.2 Gambaran Partai Gerindra	39
4.3 Dinamika Partai Gerindra Kota Makassar	48

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Keterlibatan Elit Partai Gerindra Memanfaatkan Sumber Daya yang ada pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 di Kota Makassar	50
--	----

5.1.1 Kemampuan Elit Partai Gerindra Mengangkat personal brand Pasangan Prabowo-Sandiaga di Kota Makaassar	50
5.1.2 Elit Partai Gerindra melakukan sosialisasi secara masif	55
5.1.3 Kemampuan Elit Partai Gerindra memanfaatkan Kekuatan Kelompok/Komunitas Relawan Yang Mendukung Pasangan Prabowo-Sandiaga di Kota Makassar.....	59

BAB VI PENUTUP

6.1 KESIMPULAN	66
6.2 SARAN	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN.....	71

DAFTAR TABEL

NO.	Nama Tabel	Halaman
Tabel 1	Penelitian Terdahulu	25

DAFTAR GAMBAR

NO.	Nama Gambar	Halaman
Gambar 1	Skema Pemikiran	31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Demokrasi merupakan salah satu prinsip dasar penyelenggaraan Negara yang dipilih oleh bangsa Indonesia. Demokrasi adalah wujud pengakuan konstitusional bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Berdasarkan prinsip tersebut, pemerintah Negara pada hakikatnya adalah pemerintahan rakyat, yaitu pemerintahan yang dibentuk dari dan oleh rakyat, serta untuk kepentingan seluruh rakyat.¹

Pemilihan umum adalah bagian terpenting dalam terselenggaranya sistem demokrasi di Indonesia karena di dalamnya masyarakat secara umum memiliki peranan besar dalam penentuan jabatan kepemimpinan secara menyeluruh baik kepala desa hingga presiden dan di wujudkan melalui partisipasi dalam pemilihan umum sesuai dengan keinginan masyarakat. Pemilihan umum dilakukan secara terbuka dengan kebebasan berpendapat dan bersikap menjadi tolak ukur utama terpenuhinya aspirasi rakyat.

Tahun 2004 bangsa Indonesia memasuki era baru dalam penentuan jabatan presiden dan wakil presiden, yakni dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum langsung. Sesuai amanat konstitusi hasil perubahan ketiga atas UUD 1945. Presiden dan wapres

¹ Amin Ibrahim, *Dinamika Politik Lokal*, Mandar Maju, Bandung 2013, hal 85

dipilih secara langsung oleh rakyat untuk masa jabatan lima tahun, sesudahnya dapat dipilih kembali untuk masa jabatan lima tahun kedua.²

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2009 (Pilpres 2009) diselenggarakan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Indonesia periode 2009-2014. Pemungutan suara dilaksanakan pada 8 Juli 2009. Secara nasional pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono berhasil menjadi pemenang dalam satu putaran langsung dengan memperoleh suara 60,80%, mengalahkan pasangan Megawati Soekarno Putri-Prabowo Subianto dan Muhammad Jusuf Kalla-Wiranto.³

Pemilihan umum presiden dan wakil presiden Indonesia selanjutnya digelar pada tanggal 9 Juli 2014. Pemilihan umum presiden tahun 2014 mempertemukan pasangan Jokowi-Jusuf Kalla dan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Tahun 2019 merupakan sejarah baru dalam pemilihan umum di Indonesia, Tahun ini pemilihan di selenggarakan serentak antara pemilihan presiden dan pemilihan legislatif. hal ini kemudian di anggap salah satu pesta demokrasi terbesar di Indonesia yang menjadikan suasana politik dalam negeri menjadi pokok utama perbincangan masyarakat, diikuti dengan banyaknya isu-isu positif bahkan negatif tentang para calon yang bertarung.

² Syamsuddin Haris, Partai Pemilu dan Parlemen era reformasi, Obor Indonesia, Jakarta 2014, hal 147.

³ <https://kpud-balangankab.go.id/pemilu-presiden-tahun-2009/> (Di akses, pada tanggal 13 juni 2019, pukul 23.17 Wita)

Efek negatif terbesar yang di timbulkan dari proses pemilihan presiden dan wakil presiden tahun ini adalah terjadinya kekacauan di beberapa daerah pasca di keluarkannya hasil hitung suara dari KPU yang secara resmi menyatakan kemenangan pasangan 01 Jokowi-Maruf. Masalah ini menjadikan suasana Negara Indonesia tidak stabil sehingga terjadi pembatasan penggunaan sosial media secara nasional oleh Kementrian Informasi dan Komunikasi serta kerugian bagi beberapa pihak. Selain itu dampak positifnya adalah terjadinya peningkatan partisipasi pemilih di hampir seluruh wilayah pemilihan. Sejak di lakukannya pemilihan yang di pilih langsung oleh rakyat tahun 2004 hingga 2014 menurun sangat drastis. Puncak rendahnya partisipasi masyarakat terjadi pada 2014 yakni 69,58%, dan meningkat kembali pada pemilihan tahun 2019 yaitu 81%.

Di kota Makassar pemilihan presiden menjadi salah satu daerah yang sangat marak isu baik buruknya calon presiden dan wakil presiden. Masing-masing tim pemenang pasangan calon berusaha meyakinkan masyarakat untuk memilih calon tertentu. Sebagai pusat perpolitikan terbesar di Sulawesi Selatan, Makassar memiliki Daftar Pemilih Tetap terbesar yang bersifat majemuk, masyarakat terangkum dari berbagai daerah dan suku. Hal ini menjadikan Makassar sangat unik dilihat dari sikap politiknya apalagi pada pemilihan presiden 2019 pemilihnya berpindah dukungan yang sangat signifikan terhadap pasangan calon yang berbeda di banding pemilihan presiden 2014.

Berdasarkan pemilihan presiden dan wakil presiden yang dilakukan pada periode sebelumnya tahun 2014 Prabowo-Hatta dinyatakan kalah telak dari pasangan Jokowi-JK 70,53% sedangkan Prabowo-Hatta 29,47% di kota Makassar. Berbanding terbalik dengan pemilihan tahun ini dimana pasangan Prabowo-Sandi hampir dominan di semua Tempat Pemungutan Suara dan kecamatan kota Makassar. Dari hasil perhitungan suara quick count pasangan Prabowo-Sandi unggul rata rata 57% dari semua lembaga survey. Berdasarkan hasil hitung KPU perolehan suara Prabowo-Sandi 57.74% dan perolehan suara Jokowi-Maruf 42.26%.

Menurut Mirriam Budiardjo bahwa partai politik adalah salah satu kelompok yang terorganisir yang anggotanya mempunyai orientasi dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka. Partai politik sebagai salah satu sarana berpartisipasi yang memiliki beberapa fungsi yaitu sebagai sarana komunikasi politik, artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, rekrutmen politik dan sebagai sarana pengaturan konflik.⁴ Dalam pembahasan ini penulis mengkhususkan pada salah satu partai pengusung calon presiden dan wakil presiden Prabowo-Sandi yakni Partai Gerindra yang merupakan partai yang di ketuai oleh calon presiden Prabowo Subianto.

⁴ Mirriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2008

Pemilihan presiden dan wakil presiden yang diselenggarakan pada 17 April 2019 diikuti oleh dua pasangan calon, yakni Jokowi-Maruf dengan nomor urut 01 dan Prabowo-Sandi dengan nomor urut 02. Pemilihan presiden dan wakil presiden di Kota Makassar tidak terlepas dari keterlibatan elit-elit partai pengusung masing-masing calon. Peran elit ini sangat berpengaruh dalam perubahan sikap politik masyarakat. Salah satu hal yang dilakukan para elit yaitu terjun langsung ke masyarakat dan melakukan kampanye terbuka. Hal ini yang kemudian mempengaruhi pilihan masyarakat Kota Makassar. Juga dengan maraknya diskusi-diskusi politik di dalam masyarakat dengan pokok bahasan keunggulan calon yang akan di pilihnya. Perubahan pilihan dapat di pengaruhi melalui isu yang tersebar dalam masyarakat dan penyebaran janji politik, lobi, hingga pembagian sembako, uang dan lain-lain.

Para elit partai yang berperan dalam hal ini diantaranya yaitu Andi Idris Manggabarani selaku Ketua DPD Gerindra Sulawesi Selatan juga seorang pengusaha yang sukses. Beliau melakukan langkah yang progresif untuk kemajuan bangsa Indonesia dengan mengadakan kegiatan deklarasi di beberapa sudut Kota Makassar. Andi Idris Manggabarani memiliki komitmen tinggi pada pasangan Prabowo-Sandiuno. Selain itu, ada juga Erick Horas selaku ketua DPC Gerindra Makassar, beliau mengatakan “Kami di Gerindra Kota Makassar fokus menjadikan Prabowo Subianto presiden dan menjaring sebanyak-banyaknya suara untuk Gerindra di Makassar. Saya tekankan agar caleg

tidak terlalu banyak janji karena masyarakat sudah jenuh janji-janji. Bekerja cerdas dan perjuangkanlaah aspirasi rakyat. Itu saja” jelasnya. Serta beberapa elit lainnya yang sangat antusias mengkampanyekan Prabowo-Sandi, dan juga para tokoh masyarakat serta pengusaha-pengusaha lainnya yang tak kalah penting dalam mendukung kemenangan Prabowo-Sandi.

Pengaruh dalam kekuasaan politik merupakan aspek penting karena memiliki kekuatan untuk mengendalikan. Seseorang yang melakukan kontrol atau pengaruh adalah aktor-aktor politik. Menurut ilmuwan politik baik dalam sistem kelompok yang disebut elite politik. Di Indonesia menurut Herbert Feith pada 1950-an elit politik dapat digolongkan menjadi (1) tipe Pembina Solidaritas yakni penggalang persatuan bangsa, (2) tipe administrator, yakni sebagai perencana dan pelaksana program pembangunan. Dalam kenyataannya, kelompok elite tidak hanya yang berkuasa (elite pemerintah) tetapi juga dari kelompok pemimpin perusahaan besar.⁵

Berdasarkan latarbelakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Elit Partai Pengusung Prabowo – Sandi pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 di Kota Makassar”**.

1.2 Rumusan Masalah

⁵ Alfian, Masalah dan Prospek Pembangunan Politik Indonesia, Jakarta. PT.Gramedia 1986,hal 97

Berdasarkan latarbelakang diatas, maka peneliti merumuskan masalah yaitu :

Bagaimana keterlibatan elit partai Gerindra memanfaatkan sumber daya yang dimiliki pada pemilihan presiden dan wakil presiden 2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai permasalahan yang terdapat pada rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

Untuk menggambarkan keterlibatan elit Partai Gerindra pada pemilihan presiden dan wakil presiden 2019 di Kota Makassar.

1.4 Manfaat Penelitian

- Manfaat Akademis :

Penelitian ini nantinya di harapkan dapat di gunakan sebagai hal yang bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu politik sebagai acuan pemahaman terkait keterlibatan elit partai dalam pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah.

- Manfaat Praktis

Penelitian ini mempunyai manfaat sebagai salah satu prasyarat untuk memperoleh gelar sarjana ilmu politik

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Elite

Menurut Powercube, politik dibagi menjadi tiga level, yakni politik global, politik nasional dan politik lokal. Politik global merupakan politik ditingkat dunia yang menyangkut persoalan hubungan antar negara, antarkawasan atau bahkan antarbenua. Politik global terwadahi dalam lembaga-lembaga yang menghimpun berbagai negara di dunia, baik pada level kawasan maupun dalam ruang yang sangat luas (global).

Politik nasional merupakan persoalan politik ditingkat negara, atau terbatas pada level nasional. Isu-isu yang diangkat cukup beragam. Sementara politik lokal merupakan masalah-masalah politik di tingkat lokal. Istilah lokal menunjukkan pada suatu tempat yang dibatasi kewenangan menurut undang-undang.⁶ Secara geografis politik lokal dapat berupa politik di level Provinsi, kabupaten/kota atau bahkan desa. Isu-isu yang dapat diangkat dalam politik lokal berupa demokrasi, birokrasi, otonomi daerah, partisipasi warga, akuntabilitas pemerintah daerah, rekrutmen elite politik, Pemilu, relasi pusat dan daerah, konflik pusat dan daerah, kekerasan di daerah hingga masalah disintegrasi.

⁶ Siti Aminah, *Kuasa Negara Pada Ranah Politik Lokal* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014)

Dalam suatu masyarakat selalu dijumpai satu kelompok individu yang memiliki pengaruh yang sering menentukan kehidupan dan perubahan masyarakat, walaupun perubahan masyarakat tidak sepenuhnya tergantung pada peran yang ia atau mereka mainkan. Individu atau sekelompok individu inilah yang lazim disebut elite.⁷ Dalam istilah Lasswell, elite adalah mereka yang memiliki dan mendapatkan lebih dari apa yang dimiliki dan didapatkan oleh orang lain. Sementara menurut Pareto, elite adalah mereka yang memiliki dan mendapatkan lebih dari apa yang dimiliki dan didapatkan oleh orang lain, ada yang memegang kekuasaan (*governing elite*) dan ada yang diluar kekuasaan (*non governing elite*). Mereka yang termasuk dalam kelompok elite yang sedang memerintah terdiri dari individu-individu yang menduduki jabatan-jabatan politis. Mereka yang termasuk dalam kelompok yang tidak sedang memerintah terdiri dari individu-individu yang tidak menduduki jabatan-jabatan politis, tetapi mempunyai kemampuan untuk memengaruhi secara langsung proses pembuatan kebijakan.⁸

Posisi pada masyarakat yang terbagi menjadi dua lapisan, yakni kelompok elite dan kelompok non elite atau massa dapat mengalami perubahan. Sekelompok individu yang berkedudukan sebagai elite tidak memiliki jaminan selamanya akan menduduki posisi tersebut. Posisi yang mereka sedang duduki tidak bersifat langgeng karena akan diganti atau

⁷ Sartono Kartodirdjo (ed), *Pesta Demokrasi di Pedesaan* (Yogyakarta:Aditya Media,1992), 131

⁸ Sp. Varma, *Teori Politik Modern*, ter. Yohannes Kristiarto, dkk (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2007), 200.

digeser oleh kelompok lainnya. Hal tersebut tidak dapat terelakkan, sebab perubahan atau pergeseran posisi elite pasti akan berlangsung dimasyarakat manapun juga. Bahkan, ada yang menyatakan bahwa tidak akan ada satu kekuatan yang mampu menghalangi terjadinya perubahan atau pergeseran posisi elite tersebut.⁹

Sehubungan dengan hal tersebut, Pareto menyatakan bahwa dalam tubuh elite terdapat kecenderungan untuk mengalami apa yang disebut sebagai “*decay*” atau pembusukan. Adanya kondisi seperti ini menyebabkan mereka yang termasuk dalam kelompok non elite atau massa mempunyai kecenderungan untuk membuat dirinya secara potensial dapat memasuki lingkungan elite. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Pareto lebih lanjut mengungkapkan pernyataan populer, yakni “sejarah merupakan kuburan bagi kaum aristokrat”. Sebagaimana diketahui bahwa mereka yang tergolong kaum aristokrat adalah mereka yang berperan sebagai elite di masyarakat yang bersangkutan. Maka, dalam suatu masyarakat dapat berlangsung suatu proses yang lebih dikenal dengan istilah “sirkulasi elite” atau “perputaran elite”. Dalam rumusan lain ternyata sirkulasi elite melibatkan suatu proses “*promotion*” kelompok non elite atau massa kedalam lapisan elite dan proses “*demotion*” kelompok elite ke dalam lapisan elite.

Menurut SP. Varma, setelah perang dunia I teori-teori tentang elite kelompok dan kekuasaan tampaknya sudah digandrungi, utamanya di

⁹ Haryanto, *Elite, Massa dan Kekuasaan*, (Yogyakarta:Polgov, 2017)

Amerika, dan masing-masing mengklaim dirinya yang paling canggih. Teori elite misalnya menegaskan, bahwa masyarakat kenyataannya dibagi kedalam dua bagian yang mencakup, sekelompok kecil manusia yang berkemampuan, dan karenanya menduduki posisi untuk memerintah. Sementara pada sisi lain, terdapat sejumlah manusia yang ditakdirkan untuk diperintah.¹⁰ Konsep dasar teori yang lahir di Eropa ini mengemukakan, bahwa di dalam kelompok penguasa (*the ruling class*) selain ada elite yang berkuasa (*the ruling elite*) juga ada elite tandingan, yang mampu meraih kekuasaan melalui massa jika elite berkuasa kehilangan kemampuan untuk memerintah. Dalam hal ini, massa memegang sejenis kontrol jarak jauh atas elite yang berkuasa, tetapi karena mereka tak begitu acuh dengan permainan kekuasaan, maka tak bisa diharapkan mereka akan menggunakan pengaruhnya.¹¹

Dalam teori elite klasik, terdapat beberapa kecenderungan yang digunakan oleh ilmuwan untuk memberikan kategori elite. *Perspektif psikologi*. Pandangan psikologi terhadap elite dikemukakan Vilfredo Pareto (1884-1923). Menurut Pareto, setiap masyarakat diperintah oleh sekelompok kecil orang yang mempunyai kualitas yang diperlukan bagi kehadiran mereka pada kekuasaan sosial politik yang penuh. Mereka yang bisa menjangkau pusat kekuasaan selalu merupakan aktor yang terbaik, dan merekalah yang disebut elite. Elite merupakan orang yang

¹⁰ Sp. Varma, *Teori Politik Modern*, ter. Yohannes Kristiarto, dkk (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2007)

¹¹ Ibid 197

berhasil, dan mampu menduduki jabatan tinggi dalam masyarakat. Mereka terdiri dari pengacara, ilmuwan toko agama, mekanik atau bahkan mafia yang umumnya dikenal pandai dan kaya.¹²

Kemampuan menduduki posisi yang terhormat didasarkan pada atribut kemanusiaan yang melekat pada seseorang, yang ia sebut sebagai *sentiment* atau *residues*. Untuk menjelaskan tentang konsep *residues*, Pareto menggunakan teori kelas dalam masyarakat. *Class one*, yakni kelas yang masih berada pada tataran "*instinct of combination*", yaitu masyarakat yang bergulat pada tataran gagasan, ide dan cita-cita untuk menuju kekuasaan. *Class two*, yakni tahap konsolidasi posisi, dalam bahasa Pareto disebut "*The Persistence of aggregates*". *Class three*, yakni kelas yang sudah menempatkan ide, gagasan dan cita-cita tersebut secara permanen dalam sebuah perintah atau kebijakan.¹³

Pareto mendiskripsikan pengertian elite dengan berbagai penuturan dan contoh yang bervariasi, tetapi sebenarnya yang di maksudkan adalah bahwa bakat dan kemampuan setiap individu berbeda-beda dalam setiap lapisan sosial. Untuk itulah kemudian sering dikenal pengelompokan struktur sosial dalam dua kelompok. Pertama lapisan yang lebih rendah, yakni sekelompok massa yang tidak merupakan golongan elite yang mungkin berpengaruh juga dalam pemerintahan. Kedua lapisan yang lebih

¹² Arnold K. Sherman, Aliza Kolker, *The Sosial Bases of Politics* (California:Worsworth Publishig Company 1987), 142

¹³ Geraint Parry, *Political Elites* (London:George Allen and Unwin LTD, 1969), 46

tinggi yakni golongan elite yang terdiri dari elite memerintah dan yang tidak memerintah.¹⁴

Prinsip umum yang dijadikan pedoman dalam mengkaji konsep-konsep elite itu telah di kemukakan oleh Pareto, Mosca, Michels. Prinsip-prinsip yang utama dapatlah dikemukakan sebaagai berikut :

1. Kekuasaan politik, seperti juga barang-barang sosial lainnya di distribusikan dengan tidak merata gagasan Pareto tentang pemeringkatan orang berdasarkan pemilikan akan barang yang berwujud kekayaan, kecakapan atau kekuasaan politik merupakan hal yang mewujudkan prinsip itu.
2. Hakekatnya orang hanya di kelompokkan dalam dua kelompok, yaitu mereka yang memiliki kekuasaan politik “penting” dan mereka yang tidak memilikinya. Kaum elite klasik umumnya berpendapat bahwa distribusi kekuasaan hampir dalam segala hal dapat di pandang dalam arti dikotomis itu.
3. Secara internal, elite itu bersifat homogen, bersatu dan memiliki kesadaran kelompok. Elite itu tidak merupakan suatu kumpulan individu yang saling terpisah-pisah, atau sekedar merupakan penjumlahan orang-orang saja. Tetapi sebaliknya, seperti juga anggota-anggota klub khusus dan terbatas individu-individu yang berada dalam elite itu saling mengenal dengan baik, memiliki

¹⁴ Sudijono Sastroadmodjo, 1995. *Perilaku Politik*, IKIP Semarang Press

latarbelakang yang mirip, dan memiliki nilai-nilai, kesetiaan dan kepentingan yang sama.

4. Elite itu mengatur kelangsungan hidupnya sendiri. Dan anggotanya berasal dari suatu lapisan masyarakat yang terbatas.
5. Kelompok elite itu hakikatnya bersifat otonom, kebal akan gugatan dari siapa pun diluar kelompoknya mengenai keputusan-keputusan yang dibuatnya. Semua persoalan politik penting di selesaikan menurut kepentingan atau tindakan kelompok.¹⁵

Pendekatan Organisasi. Elie dilihat dari sudut pandang organisasi dikemukakan oleh Mosca dan Michels. Menurut Gaetano Mosca (1858-1941), orang hanya dikelompokkan dalam dua kelompok, yaitu mereka yang memiliki kekuasaan politik “penting” dan mereka yang tidak memilikinya. Gaetano mosca menggambarkan masyarakat sebagai berikut :

“ In all societies, two class of people, at class that rules and that class is ruled. The first class always the less numerous, performs and political functions, monopolizes power and enjoy the advantages that power brings, whereas the second, the more numerous class, is directed and controlled by the first, in manner that is now more or less legal, now more or less arbitrary and violent, and supplies the first”¹⁶ Artinya : Dalam setiap masyarakat terdapat dua kelas penduduk, satu kelas yang menguasai dan satu kelas yang dikuasai. Kelas pertama, yang jumlahnya selalu lebih kecil, menjalankan semua fungsi politik, memonopoli kekuasaan dan menikmati keuntungan yang diberikan oleh kekuasaan itu, sedangkan kelas kedua yang jumlahnya jauh lebih besar, diatur dan dikendalikan oleh kelas pertama itu.

¹⁵ Ibid 144-145

¹⁶ Robert D. Putnam, “*Studi Perbandingan Elite Politik*” dalam Mohtar Mas’oed dan Colin MacAndrews

Elite politik adalah individu yang memiliki banyak kekuasaan politik dibandingkan dengan yang lain. Yang dimaksud kekuasaan adalah, kekuasaan sebagai kemampuan untuk memengaruhi orang lain, dan kekuasaan sebagai kemampuan untuk memengaruhi perbuatan keputusan kolektif. Putnam mengartikan kekuasaan sebagai probabilitas untuk mempengaruhi kebijaksanaan dan kegiatan negara, atau probabilitas untuk memengaruhi alokasi nilai-nilai secara otoritatif.¹⁷

Dalam kekuasaan politik, terdapat stratifikasi yang menggambarkan tingkat pengaruh seseorang dalam kekuasaan. Putnam menggambarkannya dalam sebuah piramid, stratifikasi teratas adalah kelompok pembuat keputusan (*proximate decision makers*). Lapisan ini sebagian besar terdiri dari orang-orang yang menduduki jabatan resmi utama, walaupun tidak selalu mereka. Lapisan kedua dibawahnya adalah kaum berpengaruh (*influentials*) yaitu individu yang memiliki pengaruh tidak langsung atau implisit yang kuat, mereka yang dimintai nasihat oleh pembuat keputusan yang kepentingan dan pendapatnya diperhitungkan oleh pembuat keputusan itu. Lapisan kedua terdiri dari para birokrat, tuan tanah, industrialis, bankir, pimpinan kelompok kepentingan, konsultan resmi dan tidak resmi.

Lapisan ketiga terdiri dari warga negara yang mengambil bagian aktif dalam kehidupan politik dan pemerintahan, misalnya sebagai anggota partai, birokrat tingkat menengah, editor surat kabar atau para penulis. Lapisan

¹⁷ Ibid. 81.

ini disebut aktivis yang jumlahnya lebih banyak di bandingkan kaum berpengaruh.

Lapisan keempat terdapat orang-orang yang menganggap kehidupan politik seperti halnya tontonan yang sangat menarik. Mereka disebut publik peminat politik (*attentive public*) ini berbeda dengan sebagian besar warga negara akibat luar biasa besarnya perhatian yang mereka berikan terhadap masalah pemerintahan dan kemasyarakatan. Mereka ini mengetahui pemain terkemuka dalam permainan politik, sekalipun tanpa melihat “angka kemenangan” yang diperoleh masing-masing pemain, dan mereka (hanya) mendiskusikan jalannya permainan dan strateginya dan jarang sekali terjun ke lapangan.

Lapisan kelima adalah kaum pemilih (*voters*). Kaum pemilih ini memiliki satu sumber politik kolektif penting, yaitu jumlahnya sangat besar, tetapi sebagai individu mereka tidak memiliki pengaruh sama sekali. Lapisan keenam adalah yang dalam pengertian politik hanya menjadi objek politik dan bukan aktor yaitu *non-partisan*. Mereka tidak beralifiasi dan tidak memiliki pengaruh politik.¹⁸

Yang mendorong elite politik untuk memainkan peran aktif dalam politik adalah karena menurut para teoritis (senantiasa) ada dorongan kemanisaan yang tak dapat dihindarkan, atau di abaikan untuk meraih kekuasaan. Politik menurut mereka merupakan permainan kekuasaan,

¹⁸ Ibid. 85-89

dan karena individu menerima keharusan untuk melakukan sosialisasi serta penanaman nilai-nilai guna menemukan ekspresi bagi pencapaian kekuasaan tersebut, maka upaya pun mereka lakukan untuk memindahkan penekanan dari para elite dan kelompok kepada individu.¹⁹

Pareto membagi tipe elite politik menjadi tiga bagian; *Pertama*, elite politik yang memerintah dengan kelicikan. Cara memerintah dengan kelicikan tidak hanya terjadi dinegara yang menganut paham otoriter, tapi juga dalam negara yang menganut paham demokratis. *Kedua*, elite politik yang memerintah dengan cara paksa. Model elite ini banyak terjadi di negara-negara yang menganut paham komunikasi dan otoriter. Para elite politik menggunakan segala cara untuk mewujudkan keinginannya. *Ketiga*, elite politik konservatif. Yakni elite yang berusaha mempertahankan kekuasaan dengan mengedepankan kepentingan pribadi atau golongan. Segala aturan dibuat agar dapat mempermudah dirinya dan kelompoknya dalam memperoleh akses terhadap kekuasaan. *Keempat*, elite politik liberal. Yakni elite yang bekerja untuk kepentingan umum dan membuka seluas-luasnya bagi setiap anggota masyarakat untuk menyatakan pendapat, memberikan masukan dan kritik.²⁰

Politik sebagai usaha untuk menggapai kehidupan yang lebih baik pun didefinisikan oleh Miriam Budiardjo dan tidak terlepas dari beberapa

¹⁹Sp. Varma, *Teori Politik Modern*, ter. Yohannes Kristiarto, dkk (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2007) 198

²⁰ Nurhamim Nahar Usman, *Percepatan dan Perlambatan Demokrasi di Tingkat Lokal*, (Jakarta:Kompas Gramedia, 2015)

konsep penting seperti negara (*state*), kekuasaan (*power*), pengambilan keputusan (*decision making*), kebijakan publik (*public policy*) dan alokasi atau distribusi (*allocation od distribution*). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa politik merupakan cara seseorang untuk menciptakan suatu kebijakan demi kebaikan bersama dengan menggunakan kekuasaan yang ditetapkan oleh negara.

Wajah politik pun digambarkan oleh Joni Lovenduski yang terdiri dari person, proses, hubungan, lembaga dan prosedur yang membuat keputusan-keputusan publik berwibawa. Lovenduski menegaskan bahwa istilah politik tidak dapat dipisahkan dari penilaian masyarakat atas pengalamannya terhadap para politisi, majelis, pemerintah serta kebijakan-kebijakan yang disajikan media sebagai wujud persaingan politik. Penilaian tersebut bersifat pengandaian dan sering berkonotasi negatif. Kenyataan bahwa lembaga-lembaga pemerintahan yang didominasi laki-laki sedangkan perempuan sebagai kaum minoritas berada pada ruang privat atau domestik membuat kaum feminis mendefinisikan istilah politik seagai kehidupan yang didasarkan oleh kekuasaan yang tidak seimbang.²¹

2.2 Konsep Elit Partai

Menurut Heywood partai adalah sebuah kelompok masyarakat yang diorganisasikan untuk tujuan memenangkan kekuasaan pemerintah, melalui sarana pemilihan atau yang lain. Partai-partai dapat bersifat

²¹ Joni Lovenduski, *Politik Berparas Perempuan* (Yogyakarta: Kanisius, 2008), 32

otoriter atau demokratis, mereka mungkin meraih kekuasaan melalui pemilihan atau melalui revolusi dan mereka mungkin mengusung ideologi-ideologi aliran kiri, kanan atau tengah, bahkan mengingkari ide-ide politik sama sekali. Perkembangan partai-partai politik dan pembentukan sebuah sistem partai telah diakui sebagai salah satu tanda modernisasi politik.²²

Dalam dinamika partai politik di aras lokal, kita temukan “orang kuat partai” yang secara individu memiliki kemampuan untuk menentukan arah dan kebijakan partai. Orang inilah yang disebut Keller sebagai elite penentu. Orang kuat partai ini secara individual mampu mengekspresikan pengaruh dan memastikan distribusi dan alokasi sumber-sumber kekuasaan bukan karena yang bersangkutan menduduki jabatan tertinggi di puncak piramida elite partai (ketua umum), tetapi meski hanya sebagai pengurus harian partai karena yang bersangkutan memiliki kapasitas pribadi yang mumpuni dibanding orang lain, maka orang ini bisa menjadi orang penting di partai.

Elite partai di daerah secara umum terbagi dua macam. Pertama, elite partai politik yang berada di parlemen. Kedua, elite partai politik yang non permanen alias sebatas menjadi pengurus partai. Dua jenis elite partai politik ini sangat berpengaruh terhadap kemajuan dan efektivitas kerja partai politik. Elite partai politik yang bertugas di parlemen harus menunjukkan kemampuannya dalam menghasilkan produk undang-undang yang pro rakyat. Kepercayaan masyarakat terhadap partai politik

²² Heywood, *Politik*. Jakarta: Pustaka Pelajar. 2014

dapat di pulihkan kembali apabila peran kadernya di parlemen memukau. Jika kader partai politik di parlemen tidak bermutu maka wibawa partai politik menurun. Sementara, elite partai politik non parlemen, yaitu elite partai politik yang tidak duduk di DPR, juga memiliki peran. Peran elite partai politik non parlemen sebenarnya lebih mengarah pada pendidikan politik warga masyarakat. Sebagai elite non parlemen, tugas utamanya bukan hanya merekrut dukungan massa melainkan juga melakukan pendidikan politik dan kaderisasi yang baik. Dengan demikian, partai politik menjadi ruang kaderisasi yang dapat melahirkan intelektual organik. Fungsi ini akan berjalan apabila para elit partai politik non parlemen menjalankan fungsi kaderisasi dengan baik. Selain itu, tugas para elit partai politik di daerah adalah mempengaruhi warga masyarakat daerah untuk meningkatkan partisipasi politiknya. Ini merupakan salah satu tugas yang prinsipil, terlebih dalam kaitannya dengan proses demokrasi di daerah. Hal yang paling pokok bagi elite politik adalah melakukan usaha-usaha rasional persuasif untuk mendorong masyarakat supaya lebih aktif dalam partisipasi politik. Masyarakat harus di yakinkan tentang arti penting dan nilai vital politik. Sehingga dengan pemahaman seperti itu masyarakat turut berpartisipasi dalam aktivitas politik.

Partai politik adalah kelompok yang terorganisir yang kelompoknya mempunyai orientasi dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan mereka. Dalam tipe

elite politik menurut Pareto masuk dalam jenis elite politik konservatif yang berusaha mempertahankan kekuasaan dengan mengedepankan kepentingan pribadi atau golongan.

Gaetano Mosca dan Surbakti mengemukakan distribusi kekuasaan dalam masyarakat menjadi dua kelas yaitu :

- 1) Kelas yang memerintah yang terdiri dari sedikit orang melaksanakan fungsi politik , memonopoli kekuasaan dan menikmati keuntungan-keuntungan yang ditimbulkan dengan kekuasaan.
- 2) Kelas yang diperintah, yang berjumlah lebih banyak, diarahkan dan dikendalikan oleh penguasa dengan cara-cara yang kurang lebih berdasarkan hukum, semauanya dan paksaan.

Jumlah orang yang berkuasa atau memerintah dalam suatu masyarakat selalu lebih sedikit daripada yang diperintah. Itu sebabnya mengapa elit politik dirumuskan sebagai sekelompok kecil orang yang mempunyai pengaruh besar dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Diantara elit politik terdapat kesamaan nilai dan berusaha mempertahankan nilai-nilai, yang berarti mempertahankan status elite politik.

Non elit yang telah menerima konsensus dasar elite saja yang dapat diterima dalam lingkungan elite. Golongan elite memiliki consensus mengenai nilai-nilai dasar suatu sistem dan berusaha memelihara serta mempertahankan sistem itu. Kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh

elit politik bukanlah cerminan aspirasi khalayak, juga bukan hasil tuntutan yang diajukan khalayak melainkan lebih merupakan cerminan nilai-nilai yang dipegang oleh kelompok elit.²³

Secara konfiguratif, bahwa kategorisasi elite beragam tergantung pada posisi jabatan ruang lingkup batas otoritas kekuasaan yang di pegangnya. Elite yang monohirarki dapat dikatakan elitis yang sangat focus pada puncak kekuasaan.

Sedangkan, Poliarki kekuasaan menyebar di berbagai institusi dengan beragam perbedaan kewenangan. Perbedaan sesungguhnya menurut Darwis dan Dorgan tergantung sistem politik yang dianut oleh negara itu sendiri. Namun Dogas menegaskan bahwa pada prinsipnya, elite merupakan populasi yang kecil dan pemegang kekuasaan untuk membedakan dengan populasi yang tidak memiliki kekuasaan relative jumlah besar.

2.3 Konsep Strategi

Secara etimologis strategi berasal dari kata majemuk bahasa Yunani, yaitu "*strategos*" yang berarti pasukan dan agein yang berarti memimpin atau strategia yang berarti kepemimpinan atas pasukan, seni memimpin pasukan. (Schroder 2009:1).

Dalam Wikipedia Indonesia Pengertian strategi adalah rencana jangka panjang dengan diikuti tindakan-tindakan yang di tujukan untuk mencapai tujuan tertentu, yang umumnya adalah "kemenangan".

²³ Goetano Mosca, *Memahami Ilmu Politik*, PT. Grasindo , Jakarta

Lucian Marin (2007:1) merangkum definisi strategi sebagai berikut, Gerry Johnson dan Kevan Scholes (dalam buku "*Exploring corporate Strategy*") mendefinisikan strategi sebagai arah atau cakupan jangka panjang organisasi untuk mendapatkan keunggulan melalui konfigurasi sumber daya alam dan lingkungan yang berubah guna mencapai kebutuhan pasar dan memenuhi harapan pihak yang berkepentingan (*stakeholder*). Henry Mintzberg mendefinisikan strategi sebagai 5P, yaitu: Strategi sebagai perspektif, strategi sebagai posisi, strategi sebagai perencanaan, strategi sebagai pola kegiatan, dan strategi penipuan (*ploy*) yaitu muslihat rahasia. Sebagai perspektif, dimana strategi dalam membentuk misi, misi menggambarkan perspektif kepada semua aktivitas. Sebagai posisi, dimana dicari pilihan untuk bersaing. Sebagai perencanaan, dalam hal strategi menentukan tujuan performansi perusahaan. Sebagai pola kegiatan, dimana dalam strategi di bentuk suatu pola, yaitu umpan balik dan penyesuaian.

Keputusan-keputusan strategi memiliki karakteristik :

- a. Penting
- b. Tidak mudah diganti
- c. Melibatkan komitmen atas sumber daya dalam waktu tertentu

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa strategi adalah upaya menyusun perencanaan dengan langkah-langkah sistematis guna memenangkan suatu pertempuran secara politis. Terdapat unsur-

unsur tambahan agar berbagai strategi yang telah disusun (di rencanakan), berjalan maksimal yaitu, taktik. Taktik yang baik sangat diperlukan dalam memukul atau mengalahkan lawan, secara ideologi maupun politik.

Strategi politik yaitu strategi yang digunakan untuk meralisasikan cita-cita politik. Strategi politik biasa digunakan dalam usaha merebut atau mempertahankan kekuasaan, terutama saat pemilihan umum. Strategi ini berkaitan dengan strategi kampanye, dengan tujuan untuk memperoleh kekuasaan dan pengaruh sebanyak mungkin dengan cara meraih hasil (suara) yang maksimal di pemilu, guna mendorong kebijakan-kebijakan yang dapat mengarah pada perubahan masyarakat, (Schroder, 2009: 7).

2.4 Penelitian Terdahulu

Tabel 1 : Penelitian Terdahulu

Berikut ini di deskripsikan beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya :

No	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1.	Iqbal Aidar Idrus (2016)	“Peran Elite Lokal Dalam Kemenangan Partai Gerindra Pada Pemilihan	Partai Gerindra berhasil memperoleh suara terbanyak kedua setelah Partai Golongan karya dan mendapatkan jatah enam kursi menjadi anggota dewan

		Umum Legislatif tahun 2014 di Kabupaten Luwu Utara,”	karena di dukung oleh toko masyarakat di Kabupaten Luwu Utara yang berasal dari golongan elite, seperti elite birokrat, elite ekonomi (pengusaha) dan elite politik mempunyai andil yang besar dalam menarik simpatisan masyarakat untuk memilih calon anggota legislatif yang berasal dari Partai Gerindra. Pada penelitian ini terlihat masyarakat memilih calon bukan karena Partai, melainkan karena calon anggota dewan yang diusung Partai Gerindra mempunyai ketokohan di daerah pemilihnya masing-masing apalagi dengan kekuasaan yang dimilikinya.
2.	Rasyid Pora (2014)	“Konflik Elite dalam Kontestasi Kekuasaan Internal Partai Politik (studi kasus	Tarikan kepentingan yang bervariasi (Pemilukada, Pileg, dan Pilpres) jelang pergantian Ketua DPW PAN Maluku Utara adalah titik awal lahirnya embrio konflik

		<p>pada DPW Partai Amanat Nasional Provinsi Maluku Utara Tahun 2013)”</p>	<p>ditubuh partai secara internal. Kedua, penyebab terjadinya konflik adalah akibat dari menguatnya sikap pragmatism elite partai, seperti terjadinya perebutan kursi pimpinan partai, memanfaatkan posisi carateker, ketidakpatuhan terhadap norma partai serta intervensi DPP PAN terhadap proses Muswilub. Ketiga, konsekuensi logis atas konflik yang terbuka di internal partai adalah eksodusnya beribu-ribu kader partai (termasuk kader potensial) ke partai lain. DPW PAN Maluku Utara Periode 2013-2018 yang mengusung pasangan calon Muhajir Sahrin. Hal lain yang juga ditemukan dari hasil penelitian ini adalah lemahnya politik akomodasi bagi Ketua Umum terpilih terhadap pihak yang kalah, sehingga eksistensi partai menjadi tergerus</p>
--	--	---	--

			oleh menguatnya sikap antipasti dari berbagai kalangan, termasuk pemilih atau masyarakat. Dalam konteks itulah, upaya penyelesaian konflik di DPW PAN Maluku Utara haruslah dilakukan dengan cara yang santun dan elegan.
--	--	--	---

Dari kedua penelitian terdahulu ada perbedaan di rumusan masalah. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan Iqbal Aidar Idrus yang membahas tentang keberhasilan Partai Gerindra meraih suara terbanyak di kabupaten Luwu Utara dikarenakan factor masyarakat memilih calon bukan karena Partai, melainkan karena calon anggota dewan yang di usung Partai Gerindra mempunyai ketokohan di daerah pemilihannya masing-masing, apalagi dengan kekuasaan dan kekayaan yang dimilikinya.

Sedangkan Rasyid Pora dalam penelitiannya menemukan tarikan kepentingan yang bervariasi (Pemilukada, Pileg, Pilpres) jelang pergantian ketua DPW PAN Maluku Utara adalah titik awal lahirnya embrio konflik di tubuh partai secara internal. Kedua, penyebab terjadinya konflik adalah akibat dari menguatnya sikap pragmatisme elite partai, seperti terjadinya perebutan kursi pimpinan partai, memanfaatkan posisi karateker, ketidakpatuhan terhadap norma partai serta intervensi DPP PAN terhadap

proses Muswilhub. Ketiga, konsekuensi logis atau konflik yang terbuka di internal partai adalah eksodusnya beribu-ribu kader partai (termasuk kader potensial) ke partai lain. DPW PAN Maluku Utara pun gagal kembali pada Pemilihan Gubernur Maluku Utara Periode 2013-2018 yang mengusung pasangan calon Muhajir-Sahrin. Hal lain yang juga ditemukan dalam penelitian ini adalah lemahnya politik akomodasi bagi Ketua Umum terpilih terhadap pihak yang kalah, sehingga eksistensi partai menjadi tergerus oleh menguatnya sikap antipati dari berbagai kalangan, termasuk pemilih atau masyarakat. Dalam konteks itulah, upaya penyelesaian konflik di DPW PAN Maluku Utara haruslah dilakukan dengan cara-cara yang santun dan elegan. Dari kedua hasil penelitian terdahulu diatas dapat disimpulkan bahwa fokus penelitiannya sangat jauh berbeda dan tidak memiliki kesamaan judul, walaupun ada teori yang hampir sama maksud dan arti dari teori tersebut, namun penelitian ini lebih di fokuskan pada Peran Elite Partai Pengusung Prabowo-Sandi Pada Pilpres 2019 di Kota Makassar.

2.5 Kerangka Pikir

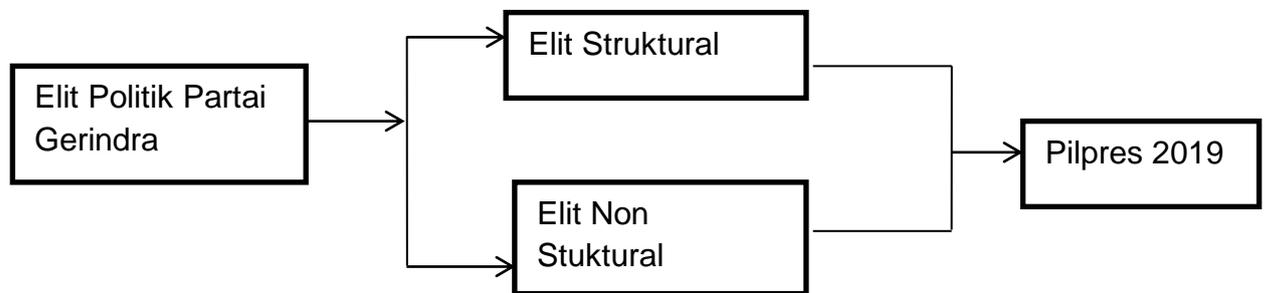
Partai Gerindra merupakan partai yang didirikan dan diketuai oleh Prabowo Subianto pada tanggal 6 februari 2008. Menurut Mirriam Budiardjo partai politik adalah salah satu kelompok yang terorganisir yang anggotanya mempunyai orientasi dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah memperoleh kekuasaan politik dan merebut

kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.

Pareto dalam teori elit politik menjelaskan bahwa masyarakat terbagi atas dua yakni masyarakat elite dan non elite. Kalangan elite terbagi menjadi dua kelompok lagi; elite yang berkuasa (government elite) dan elite yang tidak berkuasa (non government elite). Sesuai dengan teori yang dikembangkan oleh Pareto maka jika di kontekskan kedalam partai Gerindra terdapat dua kelompok elit yakni elit struktural dan elit non struktural. Elit struktural adalah elit yang memegang kendali dalam keputusan kebijakan arah partai yakni pengurus inti partai. Sedangkan elit non struktural adalah elit yang berada di luar pengurus inti dan hanya berstatus kader dalam partai.

Keterlibatan elit partai Gerindra dalam pemilihan presiden tahun 2019 di Kota Makassar tentunya memberikan sumbangsi yang sangat baik untuk Gerindra dan kadernya, bahkan peningkatan suara yang signifikan pada pemilihan presiden tahun ini.

2.6 Skema Pemikiran



Gambar 1 : Skema pemikiran